



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 805 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2021 tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR⁸⁰⁵TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2023

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	UNIT KERJA	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp.)
1.	Dinas Pendidikan	Rp. 2.500.000.000
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 3.000.000.000
3.	RSUD Sultan Suriansyah	Rp. 1.000.000.000
4.	Puskesmas Cempaka	Rp. 25.000.000
5.	Puskesmas Teluk Tiram	Rp. 25.000.000
6.	Puskesmas Pelambuan	Rp. 25.000.000
7.	Puskesmas Banjarmasin Indah	Rp. 25.000.000
8.	Puskesmas Teluk Dalam	Rp. 25.000.000
9.	Puskesmas Cempaka Putih	Rp. 25.000.000
10.	Puskesmas Sungai Mesa	Rp. 25.000.000
11.	Puskesmas 9 Nopember	Rp. 25.000.000
12.	Puskesmas Sungai Bilu	Rp. 25.000.000
13.	Puskesmas Pekapuran Raya	Rp. 25.000.000
14.	Puskesmas Karang Mekar	Rp. 25.000.000
15.	Puskesmas Terminal	Rp. 25.000.000
16.	Puskesmas Gadang Hanyar	Rp. 25.000.000
17.	Puskesmas S. Parman	Rp. 25.000.000
18.	Puskesmas Kayu Tangi	Rp. 25.000.000
19.	Puskesmas Sungai Jingah	Rp. 25.000.000
20.	Puskesmas Kuin Raya	Rp. 25.000.000
21.	Puskesmas Alalak Tengah	Rp. 25.000.000
22.	Puskesmas Alalak Selatan	Rp. 25.000.000
23.	Puskesmas Pekauman	Rp. 25.000.000
24.	Puskesmas Kelayan Timur	Rp. 25.000.000
25.	Puskesmas Pemurus Dalam	Rp. 25.000.000
26.	Puskesmas Basirih Baru	Rp. 25.000.000
27.	Puskesmas Kelayan Dalam	Rp. 25.000.000
28.	Puskesmas Pemurus Baru	Rp. 25.000.000
29.	Puskesmas Beruntung Raya	Rp. 25.000.000
30.	Laboratorium Kesehatan Banjarmasin	Rp. 25.000.000
31.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 1.500.000.000
32.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp. 500.000.000
33.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 1.000.000.000
34.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 300.000.000
35.	Dinas Sosial	Rp. 400.000.000
36.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp. 300.000.000
37.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp. 400.000.000
38.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp. 3.500.000.000
39.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 300.000.000
40.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.100.000.000
41.	Dinas Perhubungan	Rp. 1.200.000.000
42.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Rp. 500.000.000

34.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp.	300.000.000
35.	Dinas Sosial	Rp.	400.000.000
36.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp.	300.000.000
37.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp.	400.000.000
38.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp.	3.500.000.000
39.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp.	300.000.000
40.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	1.100.000.000
41.	Dinas Perhubungan	Rp.	1.200.000.000
42.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Rp.	500.000.000
43.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp.	400.000.000
44.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp.	250.000.000
45.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Rp.	750.000.000
46.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp.	250.000.000
47.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp.	150.000.000
48.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp.	500.000.000
49.	Sekretariat Daerah	Rp.	4.000.000.000
50.	Sekretariat DPRD	Rp.	3.500.000.000
51.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Rp.	1.000.000.000
52.	Inspektorat	Rp.	300.000.000
53.	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Rp.	500.000.000
54.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp.	150.000.000
55.	Kecamatan Banjarmasin Timur	Rp.	500.000.000
56.	Kecamatan Banjarmasin Utara	Rp.	500.000.000
57.	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Rp.	500.000.000
58.	Kecamatan Banjarmasin Barat	Rp.	500.000.000
59.	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Rp.	500.000.000
60.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Rp.	500.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA